



KEMENDIKBUDRISTEK

023.03.419528

2024



LAPORAN KEUANGAN

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 31 DESEMBER 2024 (ANAUDITED)

31 Desember 2024

Audited

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Inderalaya, Mei 2025
Kepala,



BALAI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.
★ NIP 197511252005011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
N E R A C A	4
LAPORAN OPERASIONAL	5
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	10
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.4. Basis Akuntansi	13
A.5. Dasar Pengukuran	13
A.6. Kebijakan Akuntansi	14
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	21
B.1. Pendapatan	21
B.2. Belanja	22
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	27
C.1. Aset Lancar	27
C.2. Aset Tetap	28
C.3. Aset Lainnya	32
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	34
C.5. Ekuitas	35
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	36
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	36
D.2. Beban Pegawai	36
D.3. Beban Persediaan	37
D.4. Beban Barang dan Jasa	38
D.5. Beban Pemeliharaan	38
D.6. Beban Perjalanan Dinas	39

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	40
D.8. Kegiatan Non Operasional	40
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	42
E.1. Ekuitas Awal	42
E.2. Surplus (Defisit) LO	42
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	42
E.4. Transaksi Antar Entitas	43
E.5. Ekuitas Akhir	44
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	45
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	45
F.2. Pengungkapan Lain-Lain	45
LAMPRAN-LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran	3
Tabel 2. Neraca	4
Tabel 3. Laporan Operasional	5
Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
Tabel 5. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2024.....	21
Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	22
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan	22
Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja.....	23
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja	23
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	24
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang	25
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal	26
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	26
Tabel 14. Rincian Persediaan	28
Tabel 15. Perbandingan Perolehan Aset Tanah	28
Tabel 16. Rincian Tanah.....	29
Tabel 17. Perbandingan Perolehan Aset Peralatan dan Mesin	29
Tabel 18. Perbandingan Perolehan Aset Gedung dan Bangunan	30
Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	32
Tabel 20. Rincian Aset Tak Berwujud.....	33
Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	34
Tabel 22. Rincian Utang Pihak Ketiga	35
Tabel 23. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	36
Tabel 24. Rincian Beban Pegawai.....	37
Tabel 25. Rincian Beban Persediaan	37
Tabel 26. Rincian Beban Barang dan Jasa.....	38
Tabel 27. Rincian Beban Pemeliharaan.....	39
Tabel 28. Rincian Beban Perjalanan Dinas	39

Tabel 29. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	40
Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional.....	41
Tabel 31. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	43
Tabel 32. Rincian Prioritas Nasional	47



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662

Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2024 Audited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Inderalaya, Mei 2025
Kepala,



Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.
NIP 197511252005011002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2024 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp188.526.000,- atau mencapai 244,84% persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp77.000.000,-. Realisasi Belanja Negara pada Keuangan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.482.780.589,- atau mencapai 94,82% dari alokasi anggaran sebesar Rp34.258.979.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp90.713.400.903,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp521.093.571,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp90.192.307.332,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp90.713.400.903,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp188.526.000,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp32.836.136.862,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp32.647.610.862,-). Kegiatan Non Operasional terdapat defisit sebesar (Rp205.980.000,-), sedangkan Pos-Pos Luar Biasa surplus/defisit sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp32.853.590.862,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp91.067.791.783,- Defisit-LO sebesar (Rp32.853.590.862,-) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp204.945.393,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp32.294.254.589,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp90.713.400.903,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	% Real. Anggaran	Realisasi
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	77.000.000	188.526.000	244,84	220.583.357
Jumlah Pendapatan		77.000.000	188.526.000	244,84	220.583.357
Belanja	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	10.916.889.000	10.751.171.327	98,48	10.584.315.602
Belanja Barang	B.4	21.372.826.000	19.763.111.097	92,47	21.989.887.323
Belanja Modal	B.5	1.969.264.000	1.968.498.165	99,96	49.376.060
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0,00	0
Jumlah Belanja		34.258.979.000	32.482.780.589	94,82	32.623.578.985

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

NERACA

PER 31 Desember 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Tabel 2. Neraca

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Persediaan	C.2	1.541.839	1.541.839
Persediaan		519.551.732	675.861.447
JUMLAH ASET LANCAR		521.093.571	677.403.286
ASET TETAP			
Tanah	C.3	43.475.010.000	43.475.010.000
Peralatan dan Mesin	C.4	10.899.208.095	9.619.977.755
Gedung dan Bangunan	C.5	55.639.736.223	55.489.403.223
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.6	884.452.000	884.452.000
Aset Tetap Lainnya	C.7	161.851.768	161.851.768
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.8	0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.9	(20.867.950.754)	(19.240.306.249)
JUMLAH ASET TETAP		90.192.307.332	90.390.388.497
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	0	0
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.11	0	0
Aset Lain-lain	C.12	45.730.000	0
AKUMULASI PENYUSUTAN			
/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.13	(45.730.000)	0
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		90.713.400.903	91.067.791.783
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	0	0
Utang yang belum ditagihkan	C.15	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.16	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	90.713.400.903	91.067.791.183
JUMLAH EKUITAS		90.713.400.903	91.067.791.183
JUMLAH EKUITAS		90.713.400.903	91.067.791.183
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		90.713.400.903	91.067.791.183

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 3. Laporan Operasional

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	188.526.000	143.770.000
Jumlah Pendapatan Operasional		188.526.000	143.770.000
Beban Operasional			
Beban Pegawai	D.2	10.751.171.327	10.582.773.763
Beban Persediaan	D.3	472.954.405	517.705.732
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.204.563.613	5.715.706.117
Beban Pemeliharaan	D.5	2.756.874.663	1.809.357.570
Beban Perjalanan Dinas	D.6	11.341.958.061	14.019.741.893
Beban Barang Untuk Diserahkan Masyarakat	D.7	52.055.020	0,
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.256.559.773	2.199.053.367
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
Jumlah Beban Operasional		32.836.136.862	34.844.338.442
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		(32.647.610.862)	(34.700.568.442)
Kegiatan Non Operasional			
Pelepasan Aset Non Lancar		0	49.370.000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	0	49.370.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	0	0
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Kegiatan Non Operasional Lainnya		(205.980.000)	27.443.357
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	0	27.443.357
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	205.980.000	0
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		(205.980.000)	76.813.357
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		(205.980.000)	76.813.357
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa			
Surplus/Defisit LO		(32.853.590.862)	(34.623.755.085)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	E.1	91.067.791.783	92.654.139.149
Surplus/Defisit LO	E.2	(32.853.590.862)	(34.623.755.085)
Koreksi Menambah/Mengurangi Ekuitas		204.945.393	463.210.529
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	463.210.529
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		204.945.393	0
Koreksi Lain-Lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E.3	32.294.254.589	32.574.197.190
Kenaikan / Penurunan Ekuitas	-	354.390.880 -	1.586.347.366
Ekuitas Akhir	E.4	90.713.400.903	91.067.791.783

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 -2024;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
29. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
30. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
31. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
32. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 202/P/2022 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
35. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
36. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
37. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 hal pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (Unaudited);
38. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-46/KN/KN.2/2023 tanggal 24 Maret 2023 hal Penyelesaian Proses Normalisasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Dan Laporan Barang Milik Kementerian/Lembaga Tahun 2022 Audited;

39. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor : 0274/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Langkah-langkah dan Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2024;
40. Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor : 0209/C1/KU.03.02/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

a. Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan arah pembangunan pendidikan pada empat periode rencana pembangunan jangka menengah. Periode 2005-2009 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 2010-2014 diarahkan pada peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional. Periode 2016-2019 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat regional. Periode 2020-2024 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat Internasional.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang merupakan perubahan dari Balai Penataran Guru (BPG) Banjarmasin. Sejalan dengan perkembangan jaman dan tuntutan akan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional melakukan restrukturisasi, dimana Balai Penataran Guru di seluruh Indonesia dialihfungsikan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Hal ini ditandai dengan turunnya SK Mendiknas Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Selanjutnya rincian tugas LPMP diatur dalam SK Mendiknas Nomor 044/O/2004 tanggal 14 Mei 2004. LPMP mempunyai tugas menjadi penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. Selanjutnya mulai tanggal 13 Februari 2007, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 07 Tahun 2007 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan direfungsionalisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Refungsionalisasi tersebut dimaksud untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat secara nasional sesuai dengan standar nasional pendidikan. Serta yang terakhir dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, maka per Juli tahun 2022 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Dengan adanya perubahan nomenklatur Lembaga juga mengalami perubahan tugas dan fungsi dimana yang utamanya adalah penambahan fungsi Paud Dikmas yang sebelumnya dilaksanakan oleh BP Paud dan Dikmas.

Pada awal berdirinya, BPMP merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara teknis dikoordinasikan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005 disebutkan bahwa LPMP berada dibawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Tahun 2010 LPMP berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 37 Tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPMP merevisi tugas pokok dan fungsi BPMP yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi.

Selanjutnya pada tahun 2016, mengikuti perubahan struktur organisasi Kemdikbud setelah terbitnya Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2016, BPMP berada dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan dimana berdasarkan Permendikbud Nomor 45 tahun 2019 berubah Kembali menjadi Direktorat jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

b. Visi Misi BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengemban tugas peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Selatan, maka BPMP Provinsi Sumatera Selatan menentukan visi berdasarkan visi Kemdikbudristek, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai wujud dukungan visi dan misi unit kerja atasannya. Adapun Visi Kemdikbudristek 2020-2024 adalah:

BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, BPMP Provinsi Sumatera Selatan sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai arahan presiden, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

c. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
TS1	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	SK1.Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	IKK1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya
			IKK1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)
TS2	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan	SK2 Meningkatkan tata kelola BPMP Sumatera Selatan	IKK2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan
			IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Sumatera Selatan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja negara

pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Laporan Keuangan diproses melalui Aplikasi SAKTI dan disajikan melalui MonSAKTI (Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) secara lengkap, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta lampiran atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN).

A.4. Basis Akuntansi

BPMP Provinsi Sumatera Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

A.6.1. Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.2. Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.5. Aset

A.6.5.1 Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga perolehan terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.6.5.2 Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

A.6.5.3 Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

A.6.5.4 Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang dan Cadangan pemerintah. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain serta Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.6.6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.6.7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan atau sampai dengan akhir Keuangan Per 31 Desember 2024, BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 16 kali. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2024

Uraian	31 Desember 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	77.000.000	77.000.000
Penerimaan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan	77.000.000	77.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	11.843.139.000	10.916.889.000
Belanja Barang	21.955.829.000	21.372.826.000
Belanja Modal	1.583.224.000	1.969.264.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	35.382.192.000	34.258.979.000

B.1. Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp188.526.000,- atau mencapai 244,84% persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp77.000.000,-. Pendapatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Pendapatan Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2024		% Real. Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	77.000.000	104.239.000	135,38%
Pendapatan Lain-Lain	0	84.287.000	100,00%
Jumlah	77.000.000	188.526.000	244,84%

Realisasi Pendapatan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp32.057.357,-) atau -14,53% dibandingkan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan berkurangnya permintaan penyewaan fasilitas sarana dan prasarana ruang kelas dan aula.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan

Uraian	Realisasi		Naik Turun	Naik Turun Realisasi
	31 Desember 2024	31 Desember 2023		
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	104.239.000	193.140.000	-46,03%	-88.901.000
Pendapatan Lain-Lain	84.287.000	27.443.357	207,13%	56.843.643
Jumlah	188.526.000	220.583.357	-14,53%	-32.057.357

B.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Lembaga yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.482.780.589,- atau 94,82% dari anggaran belanja sebesar Rp34.258.979.000,-. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja pada Keuangan Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	31 Desember 2024		% Real. Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	10.916.889.000	10.751.171.327	98,48%
Belanja Barang	21.372.826.000	19.763.111.097	92,47%
Belanja Modal	1.969.264.000	1.968.498.165	99,96%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Realisasi Belanja Kotor	34.258.979.000	32.482.780.589	94,82%
Pengembalian Belanja		0	-
Realisasi Belanja Netto	34.258.979.000	32.482.780.589	94,82%

Realisasi Belanja pada Keuangan Per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp140.798.396,-) atau -0,43% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja

Uraian	Realisasi		Naik Turun	Naik Turun Realisasi
	31 Desember 2024	31 Desember 2023		
Belanja Pegawai	10.751.171.327	10.584.315.602	1,58%	166.855.725
Belanja Barang	19.763.111.097	21.989.887.323	-10,13%	-2.226.776.226
Belanja Modal	1.968.498.165	49.376.060	3886,75%	1.919.122.105
Belanja Bantuan Sosial	0	0		0
Jumlah Realisasi Belanja	32.482.780.589	32.623.578.985	-0,43%	-140.798.396

B.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai pada Keuangan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.751.171.327,- dan Rp10.584.315.602,-. Realisasi Belanja Pegawai pada Keuangan Per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp166.855.725,- atau 1,58% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya 4 orang pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan kenaikan kelas jabatan tunjangan kinerja dan penambahan (mutasi) 3 orang pegawai (Jabatan Fungsional widyaprada).

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Realisasi		Naik Turun	Naik Turun Realisasi
	31 Desember 2024	31 Desember 2023		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.900.411.099	5.853.530.144	0,80%	46.880.955
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	-	0
Belanja Tunj. Khusus & Transito	4.850.760.228	4.730.785.525	2,54%	119.974.703
Jumlah Realisasi Belanja	10.751.171.327	10.584.315.669	1,58%	166.855.658

B.2.2. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk membeli barang yang habis pakai, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, atau barang yang akan dijual. Belanja barang juga dapat mencakup: Belanja barang operasional dan non operasional, Belanja barang persediaan, Belanja pemeliharaan, Belanja perjalanan, Belanja barang ekstrakomptabel. Realisasi Belanja Barang pada Keuangan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.763.111.097,- dan Rp21.989.887.323,-. Realisasi Belanja Barang pada Keuangan Per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp2.226.776.226,-) atau -10,13% dibandingkan realisasi belanja barang pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran Tahun 2024 untuk belanja barang lebih kecil dibandingkan dengan pagu anggaran Tahun 2023.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Uraian	Realisasi		Naik Turun	Naik Turun Realisasi
	31 Desember 2024	31 Desember 2023		
Belanja Barang Operasional	1.618.812.932	1.592.970.359	1,62%	25.842.573
Belanja Barang Non Operasional	1.993.394.120	1.909.536.273	4,39%	83.857.847
Belanja Barang Persediaan	659.959.147	539.148.896	22,41%	120.810.251
Belanja Jasa	1.590.106.561	2.213.199.485	-28,15%	-623.092.924
Belanja Pemeliharaan	2.558.880.276	1.715.290.417	49,18%	843.589.859
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11.341.958.061	14.019.741.893	-19,10%	-2.677.783.832
Jumlah Realisasi Belanja	19.763.111.097	21.989.887.323	-10,13%	-2.226.776.226

B.2.3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal pada Keuangan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.968.498.165,- dan Rp49.376.060,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Keuangan Per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.919.122.105,- atau 3886,75% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena untuk tahun anggaran 2024 BPMP Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan tambahan belanja modal peralatan dan mesin.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Realisasi		Naik Turun	Naik Turun Realisasi
	31 Desember 2024	31 Desember 2023		
Belanja Modal Tanah	0	0		0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.968.498.165	49.376.060	3886,75%	1.919.122.105
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0		0
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	0	0		0
Belanja Modal Lainnya	0	0		0
Jumlah Realisasi Belanja	1.968.498.165	49.376.060	3886,75%	1.919.122.105

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran anggaran untuk membeli peralatan dan mesin yang digunakan dalam kegiatan operasional. Belanja modal ini mencakup biaya pembelian, pengangkutan, instalasi, dan biaya lainnya untuk mempersiapkan peralatan dan mesin hingga siap digunakan. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Keuangan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.969.264.000,- dan Rp1.968.498.165,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Desember TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp765.835,- atau 0,04% bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2024		% Real. Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.969.264.000	1.968.498.165	99,96%
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0	0	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	0	-
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	-
Realisasi Belanja Kotor	1.969.264.000	1.968.498.165	99,96%
Pengembalian Belanja		0	-
Realisasi Belanja Netto	1.969.264.000	1.968.498.165	99,96%

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian gedung dan bangunan, serta perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunannya. Belanja modal ini bertujuan untuk menambah kapasitas gedung dan bangunan hingga siap pakai. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Keuangan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Keuangan Per 31 Desember 2024 sama seperti Tahun 2023 sebesar 0,00%. Hal ini disebabkan karena pada TA 2024 BPMP Provinsi Sumatera Selatan tidak mendapatkan anggaran belanja modal Gedung dan bangunan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar, yaitu apabila Aset diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran. Kas ini berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas umum daerah per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

C.1.2. Persediaan

Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang. Persediaan dapat berupa barang jadi, bahan mentah, atau barang dalam proses. Nilai Persediaan per 31 Desember

2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.541.839,- dan Rp1.541.839,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 14. Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	35.279.238	70.070.202
Barang untuk Pemeliharaan	42.032.035	18.230.716
Suku Cadang	0	0
Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Bahan untuk Proses Produksi	0	0
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0
Persediaan Bahan Lainnya	0	0
Jumlah	77.311.273	88.300.918

C.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BPMP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.475.010.000,- dan Rp43.475.010.000,-. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 15. Perbandingan Perolehan Aset Tanah

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan Penurunan
Nilai Aset Tanah	12.270.218.000	12.270.218.000	0
Jumlah	12.270.218.000	12.270.218.000	0

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	43.475.010.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0

Saldo per 31 Desember 2024	43.475.010.000
-----------------------------------	-----------------------

Rincian saldo Tanah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	5576 m2	Inderalaya Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan	
2.	20200 m2	Inderalaya Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan	43.390.388.497
Jumlah			43.390.388.497

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp10.899.208.095,- dan Rp9.619.977.755,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Perolehan Aset Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan Penurunan
Nilai Aset Peralatan dan Mesin	13.899.144.688	12.223.891.468	1.675.253.220
Jumlah	13.899.144.688	12.223.891.468	1.675.253.220

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	9.619.977.755
Mutasi Tambah	1.675.253.220
Pembelian	1.675.253.220
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	0
Saldo per 31 Desember 2024	11.295.230.975
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-8.998.075.625

Untuk tahun anggaran 2024 terdapat belanja modal terkait pengadaan peralatan dan mesin, sampai dengan pelaporan yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat

beberapa realisasi diantaranya pengadaan peralatan perkantoran berupa peralatan podcast sebanyak 1 set, pengadaan meja televisi sebanyak 7 unit, pengadaan air conditioner (AC) sebanyak 6 unit, pengadaan televisi sebanyak 7 unit, pengadaan dispenser sebanyak 15 unit, pengadaan vacuum cleaner sebanyak 2 unit, pengadaan kulkas sebanyak 1 unit, pengadaan mesin gergaji kayu sebanyak 1 unit, pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 2 unit, pengadaan sajadah premium sebanyak 1 set, pengadaan meja kerja sebanyak 18 unit, pengadaan laci dorong sebanyak 72 unit, pengadaan kursi rapat sebanyak 74 unit, pengadaan meja pimpinan sebanyak 7 unit, pengadaan laptop sebanyak 11 unit, pengadaan sofa sebanyak 4 set, Soundsystem 1 set, dan videotron sebanyak 4 set.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp55.639.736.223,- dan Rp55.489.403.223,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Perbandingan Perolehan Aset Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan Penurunan
Nilai Aset Gedung dan Bangunan	33.521.481.322	30.779.473.726	2.742.007.596
Jumlah	33.521.481.322	30.779.473.726	2.742.007.596

Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	55.489.403.223
Mutasi Tambah	0
Penambahan nilai Aset	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	55.489.403.223
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-11.402.768.563

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp884.452.000,- dan Rp884.452.000,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	884.452.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0

Saldo per 31 Desember 2024	884.452.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-467.106.566

Untuk TA 2024 BPMP Provinsi Sumatera Selatan tidak mendapatkan anggaran terkait belanja modal renovasi jalan, irigasi dan jaringan.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp161.851.768,- dan Rp161.851.768,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	161.851.768
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	0

Saldo per 31 Desember 2024	161.851.768
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan belum selesai pada akhir tahun anggaran. Konstruksi dalam

pengerjaan mencakup: Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi, Jaringan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya diklasifikasikan sebagai aset tetap karena akan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan akan dipindahkan ke pos aset tetap jika telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat sesuai tujuan perolehannya. Saldo konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang dimiliki BPMP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp20.867.950.754,-) dan (Rp19.240.306.249,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	10.899.208.095	8.998.075.625	1.901.132.470
Gedung dan Bangunan	55.639.736.223	11.402.768.563	44.236.967.660
Jalan, Irigasi dan Jaringan	884.452.000	467.106.566	417.345.434
Aset Tetap Lainnya	161.851.768	0	161.851.768
Jumlah	67.585.248.086	20.867.950.754	46.717.297.332

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset non-lancar yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap, aset tak berwujud, dan aset kemitraan dengan pihak ketiga. Aset lain-lain memiliki manfaat jangka panjang.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Tak Berwujud	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0

Rincian aset tak berwujud per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian Aset Tak Berwujud		Nilai
1.	Aplikasi Perkantoran dan ULT	0
2.	Aplikasi Website Lembaga	0
Jumlah		0

C.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp45.730.000,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Lain-Lain	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	45.730.000

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp45.730.000,-) dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-Lain	45.730.000	-45.730.000	91.460.000
Jumlah	45.730.000	-45.730.000	91.460.000

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek juga dikenal sebagai liabilitas lancar karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam satu tahun.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Tabel 22. Rincian Utang Pihak Ketiga

Uraian/ Penjelasan	Jumlah
1.	
Jumlah	0

C.4.2. Utang yang belum ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp90.713.400.903,- dan Rp91.067.791.183,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp188.526.000,- dan Rp220.583.357,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 23. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun	Naik/Turun Realisasi
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	104.239.000	143.770.000	-27,50%	-39.531.000
Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Keuangan	0	0	-	0
Pendapatan Denda	0	0	-	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	84.287.000	76.813.357	9,73%	7.473.643
Jumlah	188.526.000	220.583.357	-14,53%	-32.057.357

Pendapatan sampai dengan Keuangan Per 31 Desember 2024 diperoleh dari pendapatan dari pemanfaatan BMN, dimana pendapatan yang diperoleh berdasarkan dari hasil sewa wisma, ruang kelas maupun aula yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan Pemerintah Daerah (BKKBN Kabupaten Ogan Ilir, Solidaritas Perempuan Palembang, BKPAKSI Kabupaten Ogan Ilir, BKKBN Kabupaten Ogan Ilir, Dinas PPPAPPKB Kabupaten Ogan Ilir, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dan IKM Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Kabupaten Ogan Ilir.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.751.171.327,- dan Rp10.582.773.763,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 24. Rincian Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik Turun	Naik Turun Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.900.411.099	5.853.530.077	0,80%	46.881.022
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	-	0
Belanja Honorarium	0	0	-	0
Belanja Lembur	0	0	-	0
Belanja Tunj. Khusus & Transito	4.850.760.228	4.730.785.525	2,54%	119.974.703
Jumlah	10.751.171.327	10.584.315.602	1,58%	166.855.725

Untuk beban pegawai pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, Hal ini disebabkan karena adanya 4 orang pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan kenaikan kelas jabatan tunjangan kinerja dan penambahan (mutasi) 3 orang pegawai (Jabatan Fungsional widyaprada).

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp472.954.405,- dan Rp517.705.732,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Persediaan

Rincian Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun	Naik/Turun Realisasi
B. Persediaan Bahan untuk Operasional	670.948.792	606.357.045	10,65%	64.591.747
B. Persediaan - dijual/diserahkan kpd Masyarakat	52.055.020	0	100,00%	52.055.020
B. Persediaan utk Proses Produksi	0	0	-	0
B. Persediaan Bahan Lainnya	0	4.845.840	-100,00%	-4.845.840
Jumlah	723.003.812	611.202.885	18,29%	111.800.927

Untuk beban persediaan pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran terkait belanja barang yang termasuk pada jenis persediaan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.204.563.613,- dan Rp5.715.706.117,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Rincian Beban Barang dan Jasa

Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik Turun	Naik Turun Realisasi
Beban Barang Operasional	1.618.812.932	1.592.970.359	1,62%	25.842.573
Beban Barang Non Operasional	1.993.394.120	1.909.536.273	4,39%	83.857.847
Beban Langganan Daya dan Jasa	885.531.561	954.037.150	-7,18%	-68.505.589
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	-	0
Beban Jasa Konsultan	233.840.000	542.457.000	-56,89%	-308.617.000
Beban Sewa	85.835.000	0	100,00%	85.835.000
Beban Jasa Profesi	384.900.000	612.550.000	-37,16%	-227.650.000
Beban Jasa Lainnya	0	94.905.000	-100,00%	-94.905.000
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	-	0
Jumlah	5.202.313.613	5.706.455.782	-8,83%	-504.142.169

Untuk beban barang dan jasa pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran terkait belanja barang pada anggaran operasional perkantoran.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.756.874.663,- dan Rp1.809.357.570,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan pada bulan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Pemeliharaan

Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.130.878.000	1.202.379.000	77,22%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	428.002.276	512.911.417	-16,55%
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	197.994.387	94.067.153	110,48%
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Persediaan suku cadang	0	0	-
Jumlah	2.756.874.663	1.809.357.570	52,37%

Untuk beban pemeliharaan pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran terkait belanja barang pada anggaran operasional perkantoran.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.341.958.061,- dan Rp14.019.741.893,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Rincian Beban Perjalanan Dinas

Rincian Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun
Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.428.660.759	2.965.277.909	15,63%
Beban Perjalanan Dinas Tetap	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjadin Paket Meeting Dalam Kota	602.120.311	243.091.491	147,69%
Beban Perjadin Paket Meeting Luar Kota	7.311.176.991	10.811.372.490	-32,38%
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0	-
Jumlah	11.341.958.061	14.019.741.890	-19,10%

Untuk beban perjalanan dinas pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.256.559.773,- dan Rp2.199.053.367,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun
B. Penyusutan Peralatan dan Mesin	545.366.359	496.620.827	9,82%
B. Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.682.577.504	1.673.816.631	0,52%
B. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.615.910	28.615.909	0,00%
B. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	-
Jumlah Beban Penyusutan	2.256.559.773	2.199.053.367	2,62%
B. Amortisasi Aset Lainnya	0	0	-
B. Penyusutan Aset Lainnya	0	0	-
Jumlah Beban Amortisasi	0	0	-
Jumlah B. Penyusutan dan Amortisasi	2.256.559.773	2.199.053.367	2,62%

Untuk beban penyusutan dan amortisasi pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional			
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun
Pendapatan Selisih Kurs yg Blm Terealisasi	0	0	-
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	0	0	-
Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset	0	0	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	0	0	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	49.370.000	-100,00%
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	0	27.443.357	-100,00%
Penerimaan Kembali B. Kontribusi Sosial TAYL	0	0	-
Jumlah Pendapatan	0	76.813.357	-100,00%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Kerugian Pelepasan Aset	0	0	-
Jumlah Beban	0	0	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp91.067.791.783,- dan Rp92.654.139.149,-.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah ditambah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp32.853.590.862,-) dan (Rp34.623.755.085,-). Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang dapat menambah atau mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi atau kesalahan mendasar.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp204.945.393,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.294.254.589,- dan Rp32.574.197.190,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 31. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis Beban	Nilai Koreksi
Ditagihkan ke Entitas Lain	32.482.780.589
Diterima dari Entitas Lain	-188.526.000
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	32.671.306.589

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp188.526.000,-) sedangkan DKEL sebesar Rp32.482.780.589,-.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode hingga 31 Desember 2024, Transfer Masuk sebesar Rp0.- sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0.-.

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung Kementerian/Lembaga dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.-.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.-.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp90.713.400.903,- dan Rp91.067.791.783,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca yang layak dijadikan catatan dalam laporan keuangan Keuangan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 ini.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

F.2.1. Rekening Pemerintah

Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kemendikbud dengan nomor 9898204195281000 atas nama BPG 014 LPMP PROV SUMSEL dan memiliki saldo per 30 September 2024 sebesar Rp. 0,-.

F.2.2. Ralat SPM, SSBP dan SSPB

Sampai dengan Keuangan Per 31 Desember TA 2024 BPMP Provinsi Sumatera Selatan tidak ada melaksanakan ralat SPM, SSBP dan SSPB

F.2.3. Revisi DIPA

Pada tahun 2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki DIPA dengan dokumen nomor : SP DIPA- 023.03.2.419528/2024 tanggal 24 November 2023 dengan pagu sebesar Rp. 35.382.192.000 Adapun rincian revisi DIPA yang telah dilakukan sampai dengan 30 September 2024 sebagai berikut :

1. DIPA Revisi ke-01 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Blokir Automatic Adjusment (AA) sebesar Rp 2.312.876.000.
2. DIPA Revisi ke-02 Tanggal 31 Januari 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.
3. DIPA Revisi ke-03 Tanggal 22 Februari 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.
4. DIPA Revisi ke-04 Tanggal 15 Maret 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.
5. DIPA Revisi ke-05 Tanggal 28 Maret 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.
6. DIPA Revisi ke-06 Tanggal 23 April 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.azz
7. DIPA Revisi ke-07 Tanggal 4 Juni 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.

8. DIPA Revisi ke-08 Tanggal 4 Juni 2024 tentang buka blokir dan belanja modal.
9. DIPA Revisi ke-09 Tanggal 10 Juli 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.
10. DIPA Revisi ke-10 Tanggal 6 September 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.
11. DIPA Revisi ke-11 Tanggal 26 September 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.
12. DIPA Revisi ke-12 Tanggal 11 Oktober 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.
13. DIPA Revisi ke-13 Tanggal 18 November 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.
14. DIPA Revisi ke-14 Tanggal 29 November 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.
15. DIPA Revisi ke-15 Tanggal 15 Desember 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.
16. DIPA Revisi ke-16 Tanggal 26 Desember 2024 tentang pemutakhiran data DIPA atau pemutakhiran POK.

F.2.4. Pengungkapan Capaian Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Satker BPMP Provinsi Sumatera Selatan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 03 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pelaksanaannya di antaranya melalui satu program prioritas, satu kegiatan prioritas, yang terbagi kedalam dua rincian output (RO) dengan pagu mencapai Rp 13.968.841.000 dan realisasi sebesar Rp 12,613,650,583 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Rincian Prioritas Nasional

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
BPMP Prov. Sumsel	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing - Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	13.672.107.000	12.332.460.493	90,20%	Lembaga	6803	6803	100%
BPMP Prov. Sumsel	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing - Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	296.734.000	281.190.090	94,76%	Lembaga	5585	5585	100%

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

1. Pada 31 Desember 2024 tidak terdapat pagu minus
2. Tidak terdapat retur yang belum terselesaikan per 31 Desember 2024
3. Penyelesaian koreksi data atas kesalahan klasifikasi pada Laporan Keuangan Anaudited Tahun Anggaran 2024 atas pendapatan pemyetoran kelebihan hasil bersih Lelang yang tidak diambil oleh yang berhak (akun 425995) ke pendapatan atas penjualan peralatan dan mesin (akun 425122) senilai Rp 84.287.000,-
4. Seluruh data transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersumber dari <https://monsakti.kemenkeu.go.id/> yang di Tarik pada tanggal 28 Februari 2025

LAMPRAN-LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESELON I : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 06/05/25 2:19 PM

Tgl Cetak : 06/05/25 8:41 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	104,239,000	143,770,000	(39,531,000)	(27.496)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	104,239,000	143,770,000	(39,531,000)	(27.496)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	104,239,000	143,770,000	(39,531,000)	(27.496)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	10,751,171,327	10,582,773,763	168,397,564	1.591
Beban Persediaan	472,954,405	517,705,732	(44,751,327)	(8.644)
Beban Barang dan Jasa	5,204,563,613	5,715,706,117	(511,142,504)	(8.943)
Beban Pemeliharaan	2,756,874,663	1,809,357,570	947,517,093	52.368
Beban Perjalanan Dinas	11,341,958,061	14,019,741,893	(2,677,783,832)	(19.1)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	52,055,020	0	52,055,020	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESELON I : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 06/05/25 2:19 PM
Tgl Cetak : 06/05/25 8:41 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,256,559,773	2,199,053,367	57,506,406	2.615
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	32,836,136,862	34,844,338,442	(2,008,201,580)	(5.763)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(32,731,897,862)	(34,700,568,442)	1,968,670,580	(5.673)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	84,287,000	49,370,000	34,917,000	70.725
Pendapatan Pelepasan Aset	84,287,000	49,370,000	34,917,000	70.725
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(205,980,000)	27,443,357	(233,423,357)	(850.564)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	27,443,357	(27,443,357)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	205,980,000	0	205,980,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(121,693,000)	76,813,357	(198,506,357)	(258.27)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(32,853,590,862)	(34,623,755,085)	1,770,164,223	(5.113)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(32,853,590,862)	(34,623,755,085)	1,770,164,223	(5.113)

Keterangan :

FINAL

Indralaya, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Satuan Kerja



Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.

NIP 197511252005011002

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ORGANISASI : 03
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 419528

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
SUMATERA SELATAN
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl. Cetak 06/05/2025 9:28 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	1,541,839	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	70,070,202	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	18,230,716	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	463,210,529	0
0.0	117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	124,350,000	0
0.0	131111	Tanah	43,475,010,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	9,619,977,755	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	55,489,403,223	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	141,886,000	0
0.0	134112	Irigasi	486,856,000	0
0.0	134113	Jaringan	255,710,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	161,851,768	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,126,827,091
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	9,674,988,502
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	141,886,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	130,520,650
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	166,084,006
0.0	391111	Ekuitas	0	91,067,791,783
JUMLAH			110,308,098,032	110,308,098,032

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 06/05/25 7:26 PM

Tgl Cetak : 06/05/25 9:30 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	91,067,791,783	92,654,139,149	(1,586,347,366)	(1.71)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(32,853,590,862)	(34,623,755,085)	1,770,164,223	(5.11)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	204,945,393	463,210,529	(258,265,136)	(55.76)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	463,210,529	(463,210,529)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	204,945,393	0	204,945,393	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	32,294,254,589	32,574,197,190	(279,942,601)	(0.86)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(354,390,880)	(1,586,347,366)	1,231,956,486	(77.66)
EKUITAS AKHIR	90,713,400,903	91,067,791,783	(354,390,880)	(0.39)

Keterangan :

FINAL

Indralaya, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Satuan Kerja



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 023
ESELON I : Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 03
SATUAN KERJA : BPM PROVINSI SUMATERA SELATAN 419528

Tgl Data : 06/05/25 2:19 PM
Tgl Cetak : 06/05/25 9:17 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_saker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	77,000,000	188,526,000	111,526,000	244.84	75,000,000	220,583,357	145,583,357	294.11
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	77,000,000	188,526,000	111,526,000	244.84	75,000,000	220,583,357	145,583,357	294.11
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	77,000,000	188,526,000	111,526,000	244.84	75,000,000	220,583,357	145,583,357	294.11
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	34,258,979,000	32,482,780,589	(1,776,198,411)	94.82	33,579,985,000	32,623,578,985	(956,406,015)	97.15
1. Belanja Pegawai	10,916,889,000	10,751,171,327	(165,717,673)	98.48	11,017,892,000	10,584,315,602	(433,576,398)	96.06
2. Belanja Barang	21,372,826,000	19,763,111,097	(1,609,714,903)	92.47	22,512,093,000	21,989,887,323	(522,205,677)	97.68
3. Belanja Modal	1,969,264,000	1,968,498,165	(765,835)	99.96	50,000,000	49,376,060	(623,940)	98.75
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 023
ESELON I : Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 03
SATUAN KERJA : BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN 419528

Tgl Data : 06/05/25 2:19 PM
Tgl Cetak : 06/05/25 9:17 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	34,258,979,000	32,482,780,589	(1,776,198,411)	94.82	33,579,985,000	32,623,578,985	(956,406,015)	97.15
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL
Indralaya, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 06/05/25 2:19 PM

Tgl Cetak : 06/05/25 9:17 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,541,839	1,541,839	0	0.00
Persediaan	519,551,732	675,861,447	(156,309,715)	(23.13)
JUMLAH ASET LANCAR	521,093,571	677,403,286	(156,309,715)	(23.07)
ASET TETAP				
Tanah	43,475,010,000	43,475,010,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	10,899,208,095	9,619,977,755	1,279,230,340	13.30
Gedung dan Bangunan	55,639,736,223	55,489,403,223	150,333,000	0.27
Jalan, Irigasi dan Jaringan	884,452,000	884,452,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	161,851,768	161,851,768	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(20,867,950,754)	(19,240,306,249)	(1,627,644,505)	8.46
JUMLAH ASET TETAP	90,192,307,332	90,390,388,497	(198,081,165)	(0.22)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	45,730,000	0	45,730,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(45,730,000)	0	(45,730,000)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	90,713,400,903	91,067,791,783	(354,390,880)	(0.39)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	90,713,400,903	91,067,791,783	(354,390,880)	(0.39)
JUMLAH EKUITAS	90,713,400,903	91,067,791,783	(354,390,880)	(0.39)
JUMLAH EKUITAS	90,713,400,903	91,067,791,783	(354,390,880)	(0.39)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	90,713,400,903	91,067,791,783	(354,390,880)	(0.39)

Keterangan :

FINAL

Indralaya, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Satuan Kerja



Ana Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.

NIP. 197511252005011002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 06/05/25 2:19 PM

Tgl Cetak : 06/05/25 9:19 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	1,541,839	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	35,279,238	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	42,032,035	0
0.0	117126	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	442,240,459	0
0.0	131111	Tanah	43,475,010,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,899,208,095	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	55,639,736,223	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	141,886,000	0
0.0	134112	Irigasi	486,856,000	0
0.0	134113	Jaringan	255,710,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	161,851,768	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,998,075,625
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	11,402,768,563
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	141,886,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	150,600,751
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	174,619,815
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	45,730,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	45,730,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	32,482,780,589
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	188,526,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	91,067,791,783
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	724,299,557	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	929,244,950
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	84,287,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	104,239,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,385,850,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	57,956	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	327,175,280	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	99,831,516	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	257,190,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	50,198,387	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	221,098,260	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	388,564,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	145,245,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,850,760,228	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,465,920,284	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	54,596,648	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 06/05/25 2:19 PM

Tgl Cetak : 06/05/25 9:19 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	40,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	98,256,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,690,094,120	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	261,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	41,800,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	617,203,380	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,371,400	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	55,835,240	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	208,121,541	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	233,840,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	85,835,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	384,900,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,130,878,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	428,002,276	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,428,660,759	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	602,120,311	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,311,176,991	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	545,366,359	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,682,577,504	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	20,080,101	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	8,535,809	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	472,954,405	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	197,994,387	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	52,055,020	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin	2,250,000	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	205,980,000	0
JUMLAH			145,582,024,076	145,582,024,076

Keterangan :

FINAL

Indralaya, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Satuan Kerja



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 06/05/25 2:19 PM

Tgl Cetak : 06/05/25 9:19 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	40,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	98,256,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,690,094,120	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	261,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	41,800,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	617,203,380	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,371,400	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	55,835,240	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	208,121,541	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	233,840,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	85,835,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	384,900,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,130,878,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	428,002,276	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,428,660,759	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	602,120,311	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,311,176,991	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	545,366,359	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,682,577,504	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	20,080,101	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	8,535,809	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	472,954,405	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	197,994,387	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	52,055,020	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2,250,000	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	205,980,000	0
JUMLAH			145,582,024,076	145,582,024,076

Keterangan :

FINAL

Indralaya, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Satuan Kerja

Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi.,M.Si.

NIP 197511252005011002



**BALAI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN**
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 419528
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
SUMATERA SELATAN
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/25 9:20 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/25 5:02 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,838,567,000	4,418,316,000	4,385,850,700	0	4,385,850,700	99.27	32,465,300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	80,000	80,000	57,956	0	57,956	72.45	22,044
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	376,321,000	327,388,000	327,175,280	0	327,175,280	99.94	212,720
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	111,012,000	100,094,000	99,831,516	0	99,831,516	99.74	262,484
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,314,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	251,115,000	262,710,000	257,190,000	0	257,190,000	97.9	5,520,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	18,599,000	51,217,000	50,198,387	0	50,198,387	98.01	1,018,613
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	272,804,000	222,112,000	221,098,260	0	221,098,260	99.54	1,013,740
511129	Belanja Uang Makan PNS	570,834,000	417,520,000	388,564,000	0	388,564,000	93.06	28,956,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	171,113,000	145,990,000	145,245,000	0	145,245,000	99.49	745,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	6,635,759,000	5,970,627,000	5,900,411,099	0	5,900,411,099	98.82	70,215,901
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,207,380,000	4,946,262,000	4,850,760,228	0	4,850,760,228	98.07	95,501,772
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	5,207,380,000	4,946,262,000	4,850,760,228	0	4,850,760,228	98.07	95,501,772
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	11,843,139,000	10,916,889,000	10,751,171,327	0	10,751,171,327	98.48	165,717,673
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,419,996,000	1,476,336,000	1,465,920,284	0	1,465,920,284	99.29	10,415,716
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	26,100,000	64,200,000	54,596,648	0	54,596,648	85.04	9,603,352
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000,000	1,200,000	40,000	0	40,000	3.33	1,160,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	208,720,000	116,300,000	98,256,000	0	98,256,000	84.48	18,044,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,672,816,000	1,658,036,000	1,618,812,932	0	1,618,812,932	97.63	39,223,068
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	649,886,000	1,993,916,000	1,690,094,120	0	1,690,094,120	84.76	303,821,880
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	158,175,000	262,700,000	261,500,000	0	261,500,000	99.54	1,200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	41,800,000	41,800,000	41,800,000	0	41,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	849,861,000	2,298,416,000	1,993,394,120	0	1,993,394,120	86.73	305,021,880
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	534,622,000	690,682,000	659,959,147	0	659,959,147	95.55	30,722,853
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	534,622,000	690,682,000	659,959,147	0	659,959,147	95.55	30,722,853
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	600,000,000	618,000,000	617,203,380	0	617,203,380	99.87	796,620

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 419528
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
SUMATERA SELATAN
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/25 9:20 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/25 5:02 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	9,000,000	4,371,400	0	4,371,400	48.57	4,628,600
522113	Belanja Langganan Air	120,000,000	66,000,000	55,835,240	0	55,835,240	84.6	10,164,760
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	354,000,000	234,000,000	208,121,541	0	208,121,541	88.94	25,878,459
522131	Belanja Jasa Konsultan	745,200,000	288,340,000	233,840,000	0	233,840,000	81.1	54,500,000
522141	Belanja Sewa	0	85,835,000	85,835,000	0	85,835,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	495,850,000	398,592,000	384,900,000	0	384,900,000	96.56	13,692,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,339,050,000	1,699,767,000	1,590,106,561	0	1,590,106,561	93.55	109,660,439
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,130,956,000	2,130,956,000	2,130,878,000	0	2,130,878,000	100	78,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	536,565,000	477,231,000	428,002,276	0	428,002,276	89.68	49,228,724
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,667,521,000	2,608,187,000	2,558,880,276	0	2,558,880,276	98.11	49,306,724
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,491,849,000	3,994,805,000	3,428,660,759	0	3,428,660,759	85.83	566,144,241
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	893,176,000	752,500,000	602,120,311	0	602,120,311	80.02	150,379,689
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,506,934,000	7,670,433,000	7,311,176,991	0	7,311,176,991	95.32	359,256,009
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	13,891,959,000	12,417,738,000	11,341,958,061	0	11,341,958,061	91.34	1,075,779,939
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	21,955,829,000	21,372,826,000	19,763,111,097	0	19,763,111,097	92.47	1,609,714,903
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,583,224,000	1,969,264,000	1,968,498,165	0	1,968,498,165	99.96	765,835
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,583,224,000	1,969,264,000	1,968,498,165	0	1,968,498,165	99.96	765,835
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,583,224,000	1,969,264,000	1,968,498,165	0	1,968,498,165	99.96	765,835
	JUMLAH BELANJA	35,382,192,000	34,258,979,000	32,482,780,589	0	32,482,780,589	94.82	1,776,198,411

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: 023

: 03

: 1100

: 419528

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

SUMATERA SELATAN

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

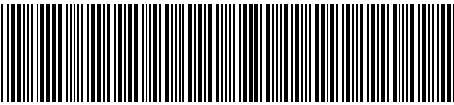
Kode Lap : LRA.P.E1.1

Tanggal : 06/05/25 9:27 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	84,287,000	0	84,287,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	77,000,000	104,239,000	0	104,239,000	135.38
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	77,000,000	188,526,000	0	188,526,000	244.84
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	77,000,000	188,526,000	0	188,526,000	244.84
	JUMLAH PENDAPATAN	77,000,000	188,526,000	0	188,526,000	244.84



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 023.03.2.419528/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
- 4. Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
- Sebesar : Rp. 35.382.192.000 (TIGA PULUH LIMA MILIAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 10 PENDIDIKAN
- 10.02 PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	35.382.192.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 35.382.192.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

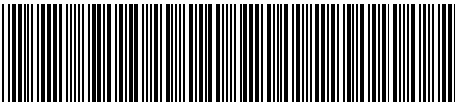
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024

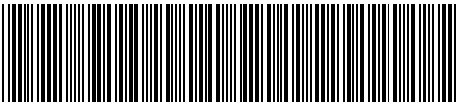


DS:7379-3546-7590-8959

Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp.	14.574.294.000
DI.6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp.	14.574.294.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	20.807.898.000
WA.2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp.	20.807.898.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7379-3546-7590-8959

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

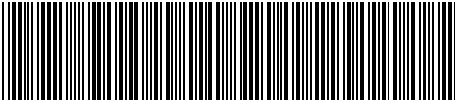
Halaman : I A. 1

Program	:	023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran				14.574.294.000
Kegiatan	:	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas				14.574.294.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya				
		2. 02	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12.388,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim		14.574.294.000
Rincian Output	:	01 QDB.750	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya (PN)	6803.00	Lembaga		14.277.560.000
		02 QDB.850	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya (PN)	5585.00	Lembaga		296.734.000
Program	:	023.03.WA	Program Dukungan Manajemen				20.807.898.000
Kegiatan	:	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah				20.807.898.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Satker Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat SAKIP minimal A				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	2005.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		19.224.674.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan		475.000.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		18.749.674.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	2005.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket		1.583.224.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit		1.583.224.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

ttd.
IWAN SYAHRIL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024



DS:7379-3546-7590-8959

I B. SUMBER DANA

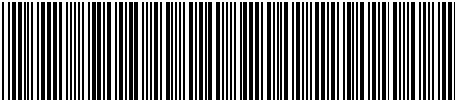
Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	35.382.192.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	35.382.192.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

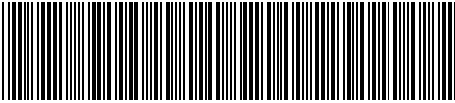


DS:7379-3546-7590-8959

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
419528	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN	11.843.139	21.955.829	1.583.224	-	-	35.382.192	11 . 08 014@ 014 11 . 08	
023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-	14.574.294	-	-	-	14.574.294		
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	-	14.574.294	-	-	-	14.574.294		
6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (11.08 SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR)	-	14.574.294	-	-	-	14.574.294		
01	RM	-	14.574.294	-	-	-	14.574.294		
023.03.WA	Program Dukungan Manajemen	11.843.139	7.381.535	1.583.224	-	-	20.807.898		
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	11.843.139	7.381.535	1.583.224	-	-	20.807.898		
2005.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.08 SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR)	11.843.139	7.381.535	-	-	-	19.224.674		
01	RM	11.843.139	7.381.535	-	-	-	19.224.674		
2005.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (11.08 SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR)	-	-	1.583.224	-	-	1.583.224		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7379-3546-7590-8959

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kewenangan : (KD)

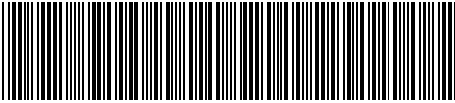
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	-	1.583.224	-	-	1.583.224	014@	
JUMLAH		11.843.139	21.955.829	1.583.224	-	-	35.382.192		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

ttd.
IWAN SYAHRIL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7379-3546-7590-8959

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

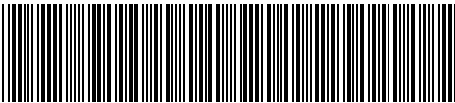
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	419528	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.948.019	2.948.019	2.948.019	2.948.019	2.948.019	2.948.019	2.948.019	2.948.019	2.948.019	2.948.019	2.948.019	2.953.983	35.382.192
		BELANJA PEGAWAI	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.986	11.843.139
		BELANJA BARANG	1.829.162	1.829.162	1.829.162	1.829.162	1.829.162	1.829.162	1.829.162	1.829.162	1.829.162	1.829.162	1.829.162	1.835.047	21.955.829
		BELANJA MODAL	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.950	1.583.224
		Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.219.656	14.574.294
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.214.058	1.219.656	14.574.294
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1.733.961	1.733.961	1.733.961	1.733.961	1.733.961	1.733.961	1.733.961	1.733.961	1.733.961	1.733.961	1.733.961	1.734.327	20.807.898
		51 BELANJA PEGAWAI	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.923	986.986	11.843.139
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	615.104	615.104	615.104	615.104	615.104	615.104	615.104	615.104	615.104	615.104	615.104	615.391	7.381.535
		53 BELANJA MODAL	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.934	131.950	1.583.224
		PERKIRAAN PENERIMAAN	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.424	77.000
		- PNBP (425131)	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.424	77.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

ttd.
IWAN SYAHRIL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
IV A. B L O K I R



DS:7379-3546-7590-8959

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [419528] BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

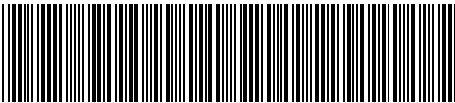
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
419528	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 452.974 52 Belanja Barang Rp. 54.000 53 Belanja Modal Rp. 398.974		
023.03.DI 6397	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas		
6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.000 Perlu melengkapi data dukung Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
023.03.WA 2005	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		
2005.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Catatan 1 Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Tidak Dapat Dicairkan Rp. 398.974 Perlu dilengkapi dokumen dukung Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

ttd.
IWAN SYAHRIL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
IV B. C A T A T A N



DS:7379-3546-7590-8959

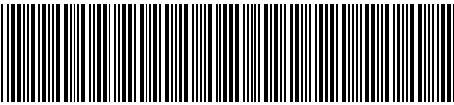
Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [419528] BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
419528	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN		
023.03.WA	Program Dukungan Manajemen		
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		
2005.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	398.974
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* 1 Unit Pengadaan Kendaraan Dinas	Rp.	398.974

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

ttd.
IWAN SYAHRIL



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 023.03.2.419528/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 16
Tanggal : 26 Desember 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
- 4. Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
- Sebesar : Rp. 34.258.979.000 (TIGA PULUH EMPAT MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 10 PENDIDIKAN
- 10.02 PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	34.258.979.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 34.258.979.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 31 Januari 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

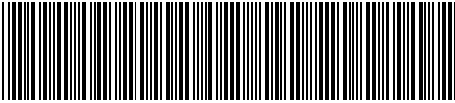
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024

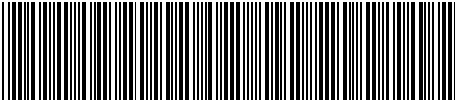


DS:9621-5532-3407-5096

Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp.	13.968.841.000
DI.6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp.	13.968.841.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	20.290.138.000
WA.2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp.	20.290.138.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9621-5532-3407-5096

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

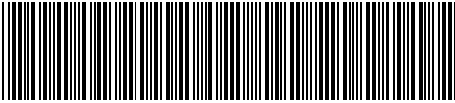
Halaman : I A. 1

Program	:	023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			13.968.841.000
Kegiatan	:	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas			13.968.841.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya			
		2. 02	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12.388,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	13.968.841.000
Rincian Output	:	01 QDB.750	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya (PN)	6803.00	Lembaga	13.672.107.000
		02 QDB.850	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya (PN)	5585.00	Lembaga	296.734.000
Program	:	023.03.WA	Program Dukungan Manajemen			20.290.138.000
Kegiatan	:	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah			20.290.138.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM			
		2. 01	Persentase Satker Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat SAKIP minimal A			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	2005.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	18.320.874.000
Rincian Output	:	01 EBA.956	Layanan BMN	1.00	Dokumen	10.000.000
		02 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	487.450.000
		03 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	17.823.424.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	2005.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	1.969.264.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit	1.969.264.000

Jakarta, 31 Januari 2024
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

ttd.
IWAN SYAHRIL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024



DS:9621-5532-3407-5096

I B. SUMBER DANA

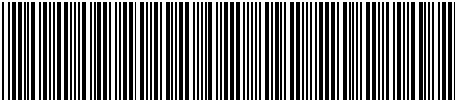
Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	34.258.979.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	34.258.979.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



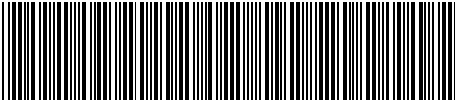
DS:9621-5532-3407-5096

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
419528	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN	10.916.889	21.372.826	1.969.264	-	-	34.258.979	11 . 08 014@ 11 . 08 014 11 . 08	
023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-	13.968.841	-	-	-	13.968.841		
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	-	13.968.841	-	-	-	13.968.841		
6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (11.08 SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR)	-	13.968.841	-	-	-	13.968.841		
01	RM	-	13.968.841	-	-	-	13.968.841		
023.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.916.889	7.403.985	1.969.264	-	-	20.290.138		
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	10.916.889	7.403.985	1.969.264	-	-	20.290.138		
2005.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.08 SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR)	10.916.889	7.403.985	-	-	-	18.320.874		
01	RM	10.916.889	7.403.985	-	-	-	18.320.874		
2005.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (11.08 SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR)	-	-	1.969.264	-	-	1.969.264		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9621-5532-3407-5096

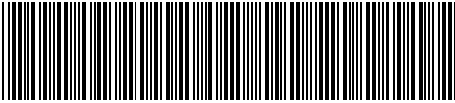
Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	-	1.969.264	-	-	1.969.264	014	
JUMLAH		10.916.889	21.372.826	1.969.264	-	-	34.258.979		

Jakarta, 31 Januari 2024
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

ttd.
IWAN SYAHRIL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9621-5532-3407-5096

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

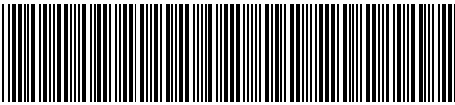
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	419528	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	408.016	1.456.166	3.326.555	2.396.977	1.658.695	3.827.925	4.040.487	2.613.249	2.831.614	4.610.132	4.358.365	2.730.797	34.258.979
		BELANJA PEGAWAI	370.243	778.446	1.619.711	776.102	783.440	1.555.792	753.378	766.205	764.599	776.367	776.367	1.196.239	10.916.889
		BELANJA BARANG	37.773	677.720	1.146.244	1.478.625	797.255	2.081.033	2.692.043	1.847.045	2.067.016	3.528.099	3.485.416	1.534.558	21.372.826
		BELANJA MODAL	0	0	560.600	142.250	78.000	191.100	595.066	0	0	305.666	96.582	0	1.969.264
		Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	0	159.168	896.965	1.036.523	702.888	1.893.352	2.164.306	827.980	822.742	1.943.008	2.448.646	1.073.263	13.968.841
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	159.168	896.965	1.036.523	702.888	1.893.352	2.164.306	827.980	822.742	1.943.008	2.448.646	1.073.263	13.968.841
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	408.016	1.296.998	2.429.590	1.360.454	955.807	1.934.573	1.876.180	1.785.270	2.008.873	2.667.124	1.909.719	1.657.534	20.290.138
		51 BELANJA PEGAWAI	370.243	778.446	1.619.711	776.102	783.440	1.555.792	753.378	766.205	764.599	776.367	776.367	1.196.239	10.916.889
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	37.773	518.552	249.279	442.102	94.367	187.680	527.737	1.019.065	1.244.274	1.585.091	1.036.770	461.295	7.403.985
023.03.DI.6397		53 BELANJA MODAL	0	0	560.600	142.250	78.000	191.100	595.066	0	0	305.666	96.582	0	1.969.264
		PERKIRAAN PENERIMAAN	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.424	77.000
		- PNBP (425131)	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.424	77.000
023.03.WA.2005															

Jakarta, 31 Januari 2024
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

ttd.
IWAN SYAHRIL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
IV A. B L O K I R



DS:9621-5532-3407-5096

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [419528] BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

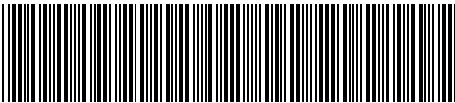
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
419528	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.248.569		
	52 Belanja Barang Rp. 1.248.569		
023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas		
6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 249.230		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.000		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 511.082		
	kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 141.044		
	kebijakan S.1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 293.213		
	Kebijakan-S1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 31 Januari 2024
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

ttd.
IWAN SYAHRIL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.03.2.419528/2024
IV B. C A T A T A N



DS:9621-5532-3407-5096

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [419528] BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
419528	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN		
023.03.WA	Program Dukungan Manajemen		
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		
2005.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	36.431
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Sepeda Motor Roda Tiga (angkut sampah)	Rp.	36.431

Jakarta, 31 Januari 2024
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

ttd.
IWAN SYAHRIL

Tahun : 2024
 Kementerian/Lemb : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
 Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL PAUD DIKMAS, DIKDAS, DAN DIKMEN
 Unit Kerja : BPMP Provinsi Sumatera Selatan

SATKER	AKUN	JENIS PNBP	TARGET PNBP	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			JUMLAH	%
			2024	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
419528	425131	Pendapatan sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	77.000.000	2.400.000	3.774.000	11.322.000	11.322.000	800.000	10.866.000	0	4.728.000	24.822.000	14.049.000	16.382.000	3.774.000	104.239.000	135%
			77.000.000	2.400.000	3.774.000	11.322.000	11.322.000	800.000	10.866.000	0	4.728.000	24.822.000	14.049.000	16.382.000	3.774.000	104.239.000	135%

Mengetahui,
 Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan



Indralaya, 31 Desember 2024
 Bendahara Penerimaan

Sangadah, M.Pd
 NIP 197305012002122001

**Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Pengeluaran**

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9898204195281000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00514/SSP/419528/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Samsuri, S.Kom
NIP 197703212005011002



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-023.03.2.419528/2024
Unit Organisasi : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Tahun : 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota : (11.08) SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR
KPPN : (014) Palembang
Satuan Kerja : (419528) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00514/SSP/419528/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	5.449.350,00	5.127.617.353,00	5.133.066.703,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	5.449.350,00	5.127.617.353,00	5.133.066.703,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	5.449.350,00	3.018.379.660,00	3.023.829.010,00	0,00
	1. BP UP*)	5.449.350,00	515.426.470,00	520.875.820,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	2.450.093.926,00	2.450.093.926,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	52.859.264,00	52.859.264,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

- 1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
- 2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
- 3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
- 4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si.
NIP 197808252002122002

KAB. OGAN KOMERING ILIR, Desember 2024

Bendahara Pengeluaran



Samsuri S.Kom
NIP 197703212005011002



Mutasi Transaksi (01/12/2023 - 31/12/2023)

downloaded at 10/01/2024 09:47:02

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)									
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH (03)									
LPMP SUMATERA SELATAN (419528)									
Rekening Induk : RKK DITJEN PAUD DIKDASMEN OPS (1008202015)									
Rekening Satker : BPG 014 LPMP PROV SUMSEL (9898204195281000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-29	18:18:16	427104	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 514,073,268	Rp. 514,073,268	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	16:19:42	418595	TARIK TUNAI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL OPERASIO	Rp. 578,815,500	Rp. 64,742,232	-	Rp. 514,073,268	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	09:00:04	707784	TARIK TUNAI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL OPERASIO	Rp. 678,815,500	Rp. 100,000,000	-	Rp. 578,815,500	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	15:01:43	209859	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 683,623,194	Rp. 4,807,694	-	Rp. 678,815,500	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	15:00:33	172187	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 684,388,054	Rp. 764,860	-	Rp. 683,623,194	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:59:27	136037	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 688,237,955	Rp. 3,849,901	-	Rp. 684,388,054	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:58:14	089042	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 688,850,439	Rp. 612,484	-	Rp. 688,237,955	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:56:57	037358	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 692,799,538	Rp. 3,949,099	-	Rp. 688,850,439	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:55:44	001917	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 693,338,052	Rp. 538,514	-	Rp. 692,799,538	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:54:28	763640	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 697,797,611	Rp. 4,459,559	-	Rp. 693,338,052	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:53:20	730194	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 698,507,086	Rp. 709,475	-	Rp. 697,797,611	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:52:10	696605	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 714,681,050	Rp. 16,173,964	-	Rp. 698,507,086	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:50:20	642903	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 717,254,181	Rp. 2,573,131	-	Rp. 714,681,050	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:29:37	753363	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 735,712,676	Rp. 18,458,495	-	Rp. 717,254,181	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:28:26	713039	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 738,649,255	Rp. 2,936,579	-	Rp. 735,712,676	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:27:10	675512	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 748,054,255	Rp. 9,405,000	-	Rp. 738,649,255	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)									
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH (03)									
LPMP SUMATERA SELATAN (419528)									
Rekening Induk : RKK DITJEN PAUD DIKDASMEN OPS (1008202015)									
Rekening Satker : BPG 014 LPMP PROV SUMSEL (9898204195281000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-28	14:25:44	632985	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 749,764,255	Rp. 1,710,000	-	Rp. 748,054,255	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:24:14	587951	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 764,352,534	Rp. 14,588,279	-	Rp. 749,764,255	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:22:06	523807	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 766,673,397	Rp. 2,320,863	-	Rp. 764,352,534	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:20:44	483986	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 770,651,397	Rp. 3,978,000	-	Rp. 766,673,397	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	14:19:26	447303	TRANSFER KE 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 774,266,397	Rp. 3,615,000	-	Rp. 770,651,397	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	09:21:26	144087	TARIK TUNAI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL OPERASIO	Rp. 974,266,397	Rp. 200,000,000	-	Rp. 774,266,397	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	08:39:42	504476	RTGS KE Sinar Laut Lampung Perm i PT Paket Fullboard Novotel Lampung kegiatanRefleksi t 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 974,296,397	Rp. 30,000	-	Rp. 974,266,397	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	08:39:42	504476	RTGS KE Sinar Laut Lampung Perm i PT Paket Fullboard Novotel Lampung kegiatanRefleksi t 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,169,218,397	Rp. 194,922,000	-	Rp. 974,296,397	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	08:37:35	448425	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 1130013708627 6010047890024849 BNI DIRECT 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,204,587,284	Rp. 35,362,387	-	Rp. 1,169,224,897	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	08:37:35	448425	BY TRX ATM PRIMA 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,169,224,897	Rp. 6,500	-	Rp. 1,169,218,397	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	08:34:21	363400	RTGS KE KARYA PERDANA. CV pemeliharaan gedung asrama 2 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,334,917,142	Rp. 130,299,858	-	Rp. 1,204,617,284	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	08:34:21	363400	RTGS KE KARYA PERDANA. CV pemeliharaan gedung asrama 2 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,204,617,284	Rp. 30,000	-	Rp. 1,204,587,284	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	08:33:05	329953	RTGS KE CV. AZIMA KONTRINDO pemeliharaan halaman/gedung kantor 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,499,815,068	Rp. 164,867,926	-	Rp. 1,334,947,142	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)									
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH (03)									
LPMP SUMATERA SELATAN (419528)									
Rekening Induk : RKK DITJEN PAUD DIKDASMEN OPS (1008202015)									
Rekening Satker : BPG 014 LPMP PROV SUMSEL (9898204195281000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-28	08:33:05	329953	RTGS KE CV. AZIMA KONTRINDO pemeliharaan halaman/gedung kantor 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,334,947,142	Rp. 30,000	-	Rp. 1,334,917,142	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	08:31:35	288969	RTGS KE CV. KILAU MUSI pemeliharaan gedung asrama 3 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,644,307,973	Rp. 144,462,905	-	Rp. 1,499,845,068	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	08:31:35	288969	RTGS KE CV. KILAU MUSI pemeliharaan gedung asrama 3 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,499,845,068	Rp. 30,000	-	Rp. 1,499,815,068	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	08:29:35	234849	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 14035000383 6010047890024833 BNI DIRECT 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,684,146,439	Rp. 39,831,966	-	Rp. 1,644,314,473	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	08:29:35	234849	BY TRX ATM PRIMA 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,644,314,473	Rp. 6,500	-	Rp. 1,644,307,973	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	07:58:33	244936	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 1130014128148 6010047890024689 BNI DIRECT 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,767,942,939	Rp. 83,790,000	-	Rp. 1,684,152,939	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	07:58:33	244936	BY TRX ATM PRIMA 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,684,152,939	Rp. 6,500	-	Rp. 1,684,146,439	(TELLER)	(Empty)
2023-12-24	19:41:56	965686	TRANSFER KE TRF TO:000000000066531718 PEMINDAHAN KE 66531718 NOVOTEL PALEMBANG HOTEL 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 1,945,077,939	Rp. 177,135,000	-	Rp. 1,767,942,939	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	16:09:11	702946	TARIK TUNAI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL operasio	Rp. 2,145,077,939	Rp. 200,000,000	-	Rp. 1,945,077,939	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	15:57:16	292214	TARIK TUNAI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL operasio	Rp. 2,245,077,939	Rp. 100,000,000	-	Rp. 2,145,077,939	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	15:53:37	168474	TARIK TUNAI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL operasio	Rp. 2,268,821,152	Rp. 23,743,213	-	Rp. 2,245,077,939	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	09:49:35	419081	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 14035000383 6010047890849127 BNI DIRECT 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 2,311,769,098	Rp. 42,941,446	-	Rp. 2,268,827,652	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)									
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH (03)									
LPMP SUMATERA SELATAN (419528)									
Rekening Induk : RKK DITJEN PAUD DIKDASMEN OPS (1008202015)									
Rekening Satker : BPG 014 LPMP PROV SUMSEL (9898204195281000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-15	09:49:35	419081	BY TRX ATM PRIMA 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 2,268,827,652	Rp. 6,500	-	Rp. 2,268,821,152	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	09:48:12	378153	BY TRX ATM PRIMA 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 2,311,775,598	Rp. 6,500	-	Rp. 2,311,769,098	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	09:48:12	378153	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 1403055081 6010047890849105 BNI DIRECT 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 2,346,162,213	Rp. 34,386,615	-	Rp. 2,311,775,598	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	09:46:43	919357	TRANSFER KE pemeliharaan AC bulan Desember 2023 TRF TO:000000 PEMINDAHAN KE 806890600 SUKSES JAYA MANDIRI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 2,363,700,213	Rp. 17,538,000	-	Rp. 2,346,162,213	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	13:01:56	199147	TARIK TUNAI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL OPERASIO	Rp. 2,763,700,213	Rp. 400,000,000	-	Rp. 2,363,700,213	(TELLER)	(Empty)
2023-12-11	09:33:42	042493	TRANSFER DARI 1008202015 230141303021517000001 14130302151700000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 2,763,250,213	-	Rp. 450,000	Rp. 2,763,700,213	(SPAN)	(Empty)
2023-12-11	09:33:42	042476	TRANSFER DARI 1008202015 230141303021516000001 14130302151600000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 2,666,569,213	-	Rp. 96,681,000	Rp. 2,763,250,213	(SPAN)	(Empty)
2023-12-11	09:33:41	041903	TRANSFER DARI 1008202015 230141303021529000001 14130302152900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 2,651,599,213	-	Rp. 14,970,000	Rp. 2,666,569,213	(SPAN)	(Empty)
2023-12-08	16:55:16	119068	TRANSFER DARI 1008202015 230141303021464000001 14130302146400000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 2,642,614,813	-	Rp. 8,984,400	Rp. 2,651,599,213	(SPAN)	(Empty)
2023-12-07	14:59:17	313273	TARIK TUNAI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL OPERASIO	Rp. 2,842,614,813	Rp. 200,000,000	-	Rp. 2,642,614,813	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)									
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH (03)									
LPMP SUMATERA SELATAN (419528)									
Rekening Induk : RKK DITJEN PAUD DIKDASMEN OPS (1008202015)									
Rekening Satker : BPG 014 LPMP PROV SUMSEL (9898204195281000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-07	10:49:46	061393	TRANSFER DARI 1008202015 230141303021047000001 14130302104700000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 2,657,813	-	Rp. 2,839,957,000	Rp. 2,842,614,813	(SPAN)	(Empty)
2023-12-01	15:31:57	334541	TARIK TUNAI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL OPERASIO	Rp. 102,657,813	Rp. 100,000,000	-	Rp. 2,657,813	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	15:31:53	331849	TARIK TUNAI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL OPERASIO	Rp. 152,657,813	Rp. 50,000,000	-	Rp. 102,657,813	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	13:01:10	241965	TRANSFER DARI 1008202015 230141303020409000001 14130302040900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 58,107,813	-	Rp. 94,550,000	Rp. 152,657,813	(SPAN)	(Empty)
2023-12-01	13:00:59	234229	TRANSFER DARI 1008202015 230141303020410000001 14130302041000000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9898204195281000 BPG 014 BPMP PROV SUMSEL	Rp. 44,711,630	-	Rp. 13,396,183	Rp. 58,107,813	(SPAN)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 3,113,700,213	Rp. 3,068,988,583	Rp. 0		



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 419528
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-03**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	35,382,192,000	35,382,192,000	0
2	Belanja	5,171,835,170	5,171,835,170	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	77,000,000	77,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	17,496,000	17,496,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	698,286,000	698,286,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	698,286,000	698,286,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-APR-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 419528
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-05**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	35,382,192,000	35,382,192,000	0
2	Belanja	9,267,586,998	9,267,586,998	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	77,000,000	77,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	29,618,000	29,618,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	210,000,000	210,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	210,000,000	210,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JUN-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 419528
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	35,382,192,000	35,382,192,000	0
2	Belanja	13,129,034,300	13,129,034,300	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	77,000,000	77,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	124,771,000	124,771,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,449,033,710	1,449,033,710	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,449,033,710	1,449,033,710	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 419528
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-07**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	35382192000	35382192000	0
2	Belanja	17213761631	17213761631	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	77000000	77000000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	124771000	124771000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	404550747	404550747	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	404550747	404550747	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-AUG-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 419528
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-08**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	35382192000	35382192000	0
2	Belanja	19816258364	19816258364	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	77000000	77000000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	129499000	129499000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	781577000	781577000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	781577000	781577000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-SEP-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 419528
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-09**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	34258979000	34258979000	0
2	Belanja	22627545537	22627545537	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	77000000	77000000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	154321000	154321000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	210000000	210000000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	210000000	210000000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-OCT-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 419528
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	34,258,979,000	34,258,979,000	0
2	Belanja	26,033,106,517	26,033,106,517	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	77,000,000	77,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	168,370,000	168,370,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	228,062,513	228,062,513	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	228,062,513	228,062,513	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-NOV-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 419528
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	34,258,979,000	34,258,979,000	0
2	Belanja	28,567,576,582	28,567,576,582	0
3	Estimasi Pendapatan	77,000,000	77,000,000	0
4	Pendapatan Bukan Pajak	184,752,000	184,752,000	0
5	Mutasi Uang Persediaan	225,453,000	225,453,000	0
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	225,453,000	225,453,000	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12-DEC-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 419528
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	34,258,979,000	34,258,979,000	0
2	Belanja	32,482,780,589	32,482,780,589	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	77,000,000	77,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	188,526,000	188,526,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-25





Lampiran
Surat Menteri Keuangan RI
Nomor : S-26/MK.6/KNL.0402/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI C.Q BPMP
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

[illegible]

[illegible]



a.n. Menteri Keuangan
Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Cahyono





Nomor : S-26/MK.6/KNL.0402/2024 29 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

u.p.

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan

Jalan Raya Lintas Timur Km 36 Indralaya

Kab. Ogan Ilir

Sehubungan dengan surat Kepala Sub Bagian Umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan nomor 2568/C7.13/KU.04.02/2023 tanggal 7 Desember 2023 hal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Sewa Barang Milik Negara pada BPMP Sumsel berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dengan nilai proporsional perolehan sebesar Rp15.837.385.240,00 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan dengan kondisi belum ada penyewa dengan periodesitas harian dengan rincian tarif sewa sebagaimana terlampir. Tarif sewa tersebut berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan sewa.
2. Berdasarkan persetujuan ini, agar Saudara menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai identitas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu keputusan sewa termasuk periodesitas sewa.
3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa diberikan

- kepada pejabat pengurus sewa BMN untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
4. Pembayaran uang sewa harian dilakukan secara sekaligus paling lambat sebelum perjanjian, dengan cara pembayaran kepada pejabat pengurus sewa BMN untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara.
 5. Permohonan perpanjangan jangka waktu surat persetujuan (masa sewa) harus disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.
 6. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke Rekening Kas Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam periode bulanan.
 7. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
 8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Palembang



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Cahyono

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
6. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan







BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240626172867
Tanggal Billing	:	26-06-2024 14:24:34
Tanggal Kedaluwarsa	:	03-07-2024 14:24:34
Tanggal Bayar	:	27-06-2024 08:57:58
Bank/Pos/Fintech Bayar	:	BANK MANDIRI
Channel Bayar	:	Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Palembang
Kementerian/Lembaga	:	023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	03 - Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Satuan Kerja	:	419528 - BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Total Disetor	:	84.287.000 (IDR)
Terbilang	:	<i>Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu (IDR)</i>
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	044778549606
NTPN	:	402210NA04JIEGU3

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
Kode Akun	:	425995 - Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
Jumlah Setoran	:	84.287.000 (IDR)
Keterangan	:	HBL LPMP Provinsi Sumatera Selatan RL 489/04.02/2024-1

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Niko Prastiya, S.E.
NIP 19881018 201012 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 489/04.02/2024-1

-----Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (12-06-2024), dimulai pukul sepuluh lebih tiga puluh menit (10:30) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----
----- Niko Prastiya, Sarjana Ekonomi, NIP 19881018 201012 1 001 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KM.6/2020 tanggal 28 Desember 2020, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-868/KNL.0402/2024 tanggal 29 Mei 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di KPKNL Palembang, Gedung Keuangan Negara Blok C Lantai 1, Jalan Kapten A. Rivai No. 4, Palembang.
-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Aria Ahmad Mangunwibawa, S. Psi., M. Si, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Indralaya, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 758/C7.13/TU.02.03/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-1187/KNL.0402/2024 tanggal 29 Mei 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-59/MK.6/KNL.0402/2024 tanggal 05 Maret 2024. -----
-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Ahmad Riduan, S.E., M.Acc. berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 760/C7.13/TU.02.03/2024 tanggal 13 Mei 2024 / 1002/C7.13/KP.16/2024 tanggal 12 Juni 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Palembang. -
-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) Unit Kendaraan roda empat Toyota Kijang Innova, Nopol BG 1175 TZ No.Mesin 1TR-6343737 No.Rangka MHFXW426472082784, Tahun Pembuatan 2007, No. BPKP 3320460.F, Masa berlaku pajak 23 Februari 2025. -----
Nilai Limit : Rp48.167.000,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) -----
Barang bergerak tersebut saat ini berada di BPMP Provinsi Sumatera Selatan Jalan Raya Lintas Timur KM.36 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. -----
dilelang apa adanya. -----
-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 07 Juni 2024. -----
-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----
-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----
-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman

Lelang, dengan.. /Lembar Kedua

f

Ttd.

Niko Prastiya, S.E.
NIP 19881018 201012 1 001

- Lelang, dengan ketentuan: -----
1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
 - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
 - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
 2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
 - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
 - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi.-----
 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran

tertinggi secara. ./Lembar Ketiga

f

Ttd.

Niko Prastiya, S.E.
NIP 19881018 201012 1 001

tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal.. /Lembar Keempat

f

Ttd.

Niko Prastiya, S.E.
NIP 19881018 201012 1 001

- Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
- Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
- Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
- Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----
- Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut,-----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 489/04.02/2024-1 tanggal 12 Juni 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp84.287.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 18 (delapan belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Ahmad Riduan, S.E., M.Acc.
NIP 19800717 200212 1 005

Niko Prastiya, S.E.
NIP 19881018 201012 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal:
Kepala KPKNL Palembang



Mardhanus Rudiyanto
NIP 19740316 199803 1 001



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240626171910
Tanggal Billing : 26-06-2024 14:20:54
Tanggal Kedaluwarsa : 03-07-2024 14:20:54
Tanggal Bayar : 27-06-2024 08:57:58
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Palembang
Kementerian/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : 537894 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALEMBANG
Total Disetor : 1.685.740 (IDR)
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 515731549608
NTPN : F5E9655DF9FGFG06

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli -
3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 1.685.740 (IDR)
Keterangan : BL LPMP Provinsi Sumatera Selatan RL 489/04.02/2024-1



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240626172867
Tanggal Billing : 26-06-2024 14:24:34
Tanggal Kedaluwarsa : 03-07-2024 14:24:34
Tanggal Bayar : 27-06-2024 08:57:58
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Palembang
Kementerian/Lembaga : **023** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I : **03** - Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Satuan Kerja : **419528** - BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Total Disetor : 84.287.000 (IDR)
Terbilang : *Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **044778549606**
NTPN : **402210NA04JIEGU3**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
Kode Akun : 425995 - Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
Jumlah Setoran : 84.287.000 (IDR)
Keterangan : HBL LPMP Provinsi Sumatera Selatan RL 489/04.02/2024-1

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN 0 1 4 Palembang	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor: 00034/SSBP/419528/2024 Tanggal: 31 Desember 2024	Lembar Ke - 1 Untuk WAJIB SETOR/BENDAHARA PENERIMA
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR :		
A. 1. NPWP Wajib Setor/ Bend 2. Nama Wajib Setor/ Bend 3. Alamat : 000433425312000 : SAMSURI SKOM : Jl. Lintas Timur Km 36 Indralaya B. 1. Kementrian/ Lembaga 2. Unit Organisasi Eselon I 3. Satuan Kerja 4. Fungsi/ Sub Fungsi/ Program : 0 2 3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI : 0 3 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah : 4 1 9 5 2 8 BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN : 1 0 0 2 W A PENDIDIKAN / - / Program Dukungan Manajemen 5. Kegiatan 6. Lokasi : 2 0 0 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah : 1 1 0 8 : 4 2 5 1 2 2 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin D. Jumlah Setoran Dengan Huruf : Rp. 84.287.000,00 : Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu : Rupiah E. Surat Penagihan (SPN) Atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara SP3N : KPPN		
PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang	Untuk : HBL LPMP Provinsi SUMatera Selatan RL 489/04.02/2024-1	
, 07 Mei 2025 SAMSURI SKOM NIP.		Diterima Oleh BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO Tanggal 31 Desember 2024 Nama Terang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711)581368 Faksimili (0711)581518
Laman <http://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

SURAT PENGANTAR

Nomor: **0509** /C7.23/KU.03.02/2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN 014)
Palembang

Bersama ini kami sampaikan:

NO	Jenis Dokumen/Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Keuangan Audited Periode 31 Desember 2024 Satuan Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan	1 (satu) Berkas	Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Audited Periode 31 Desember 2024 Satuan Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Indralaya, 5 Mei 2025

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



[Signature]
Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.
NIP. 197511252005011002



**BALAI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN**
PROVINSI SUMATERA SELATAN